

**ANALISIS HUKUM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU UNTUK KEPASTIAN DAN KEADILAN**Dwiagustini<sup>1</sup>, EndehSuhartini<sup>2</sup>, R.Djuniarsono<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas DjuandaEmail : [E.2110846@unida.ac.id](mailto:E.2110846@unida.ac.id)<sup>1</sup>, [endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id)<sup>2</sup>, [Djuniarsono@unida.ac.id](mailto:Djuniarsono@unida.ac.id)<sup>3</sup>**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Kepastian dan Keadilan, Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi regulasi hukum dan faktor yang menghambat hal tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dan lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan melalui berbagai literatur baik dari undang-undang dan konseptual. Sumber-sumber yang digunakan meliputi data primer seperti wawancara dan observasi, serta sumber sekunder seperti bahan-bahan hukum primer. Teknik pengumpulan datanya melibatkan wawancara, Reseach Literatur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan proses kerja yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup aspek pelayanan pasien dan pengelolaan internal, seperti pendaftaran dan penanganan keluhan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, dan tantangan koordinasi antarinstansi menghambat implementasi regulasi secara optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam pelayanan kesehatan juga berkontribusi pada kesulitan dalam penerapan hukum, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan di Puskesmas Pagar Jati.

**Kata Kunci:** Peningkatan, Pelayanan, Masyarakat**Article history**Received: April 2025  
Reviewed: April 2025  
Published: April 2025

Plagirism checker no 719

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365**Copyright : author****Publish by : causa**This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, terdapat tujuan utama yang berfokus pada peningkatan kemauan, kemampuan, dan kesadaran setiap individu untuk menjalani hidup yang sehat. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai langkah maju dalam pengaturan kesehatan, pada tanggal 8 Agustus 2023, telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai berbagai aspek kesehatan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban individu, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, serta berbagai hal penting lainnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab negara, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui program Jaminan Sosial, yang dirancang untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi masyarakat. Jaminan sosial ini sangat penting bagi negara karena membantu dalam menyediakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Pemerintah mengelola berbagai bentuk jaminan sosial melalui badan atau institusi yang khusus menangani bidang ini. Setiap institusi memiliki kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai jenis masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif. Dengan demikian, jaminan sosial menjadi salah satu alat utama bagi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia atau hak bagi setiap individu (*the right of self determination*) yang harus diwujudkan melalui jaminan pemberian kesehatan yang baik, aman dan berkualitas oleh pemerintah dan jasa pelayanan Kesehatan. Namun Derajat kesehatan pada masyarakat kurang mampu, masih sangat rendah di Indonesia<sup>1</sup>.

Kondisi kesehatan masyarakat yang kurang baik, terutama di kalangan masyarakat miskin, terlihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Pelayanan ini sering kali sulit diakses, dengan prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-belit. Selain itu, terdapat kurangnya sosialisasi dari rumah sakit dan Puskesmas mengenai pentingnya Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat. Di samping itu, pemilihan kriteria untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari kartu jaminan kesehatan juga sering kali tidak tepat.

Hak Asasi Manusia dan konsep negara hukum adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebenarnya, pemikiran tentang hukum berkaitan erat dengan ide-ide mengenai bagaimana keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pengakuan dan penegakan negara hukum memiliki tujuan penting, yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa hak-hak individu serta kebebasan mereka harus diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Dengan adanya negara hukum, setiap orang seharusnya merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-haknya, sehingga dapat hidup dengan lebih baik dan harmonis dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini mencakup cara-cara dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari data dan bahan yang diperlukan. Semua ini bertujuan untuk melengkapi dan mendukung penyusunan skripsi dengan baik. Dalam proses ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, yang juga dikenal sebagai pendekatan empiris. Pendekatan ini melibatkan wawancara dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi langsung dan perspektif yang lebih mendalam.

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yang sering disebut sebagai Library Research. Metode ini melibatkan penelusuran dan pengkajian literatur hukum yang relevan, serta analisis terhadap data sekunder yang ada. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan kebenaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara ini, penulis berharap dapat mencapai kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam skripsi yang disusun. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Yustina, Endang Wahyati. "Hak atas informasi publik dan hak atas rahasia medik: problema hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan." *PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2014): 248-269.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Regulasi Hukum dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

#### 1. Penerapan regulasi hukum di puskesmas pagar jati

Regulasi hukum dalam puskesmas mencakup banyak sekali aspek, dimulai dari pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga perlindungan hak pasien. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang efisien dan efektif. Puskesmas diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya, sehingga pelayanan kesehatan diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi puskesmas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya undang-undang ini, puskesmas memiliki pedoman yang jelas dalam menyediakan layanan kesehatan, baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Hal ini penting agar puskesmas dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Selain itu, penerapan regulasi hukum juga mencakup aspek keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan layanan kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat, puskesmas dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan regulasi hukum di puskesmas. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pasien, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan kesehatan. Edukasi tentang hak pasien dapat dilakukan agar masyarakat lebih paham akan regulasi hukum dalam pelayanan kesehatan.

Puskesmas Pagar Jati juga berusaha untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal. Kerja sama ini dibuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan melibatkan berbagai pihak, puskesmas dapat lebih efektif dalam menerapkan regulasi hukum yang berlaku.

Di era digital saat ini, Puskesmas Pagar Jati juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam penerapan regulasi hukum. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi membantu puskesmas dalam mendata pasien dan memantau pelayanan yang diberikan. Teknologi ini juga memudahkan komunikasi antara tenaga medis dan pasien, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Puskesmas Pagar Jati berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dalam penerapan regulasi hukum. Dengan melibatkan semua pihak, baik tenaga medis maupun masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat semakin baik. Penerapan regulasi hukum yang efektif akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kepercayaan terhadap puskesmas.

Jadi penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati merupakan proses yang kompleks namun sangat penting. Dengan mengikuti regulasi yang ada, puskesmas dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam membentuk sebuah sistem kesehatan yang lebih baik untuk masa depan.

---

<sup>2</sup> Oktemka, M. E. (2024). Pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan puskesmas di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).

## 2. Dampak dalam penerapan regulasi hukum di puskesmas pagar jati

Penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan standar pelayanan. Dengan adanya regulasi yang jelas, puskesmas dapat memastikan bahwa semua prosedur medis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak pasien. Puskesmas Pagar Jati menerapkan berbagai kebijakan yang menjamin hak pasien untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai kondisi kesehatan mereka. Dengan mengetahui hak-hak mereka, pasien merasa lebih diberdayakan dan terlibat dalam proses pengobatan. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara pasien dan tenaga medis.

Dampak lain dari penerapan regulasi hukum adalah peningkatan etika kerja tenaga medis. Regulasi yang ada mengharuskan tenaga kesehatan untuk mematuhi kode etik dalam memberikan pelayanan. Puskesmas Pagar Jati menekankan pentingnya etika dalam berinteraksi dengan pasien, yang berdampak pada peningkatan *profesionalisme* dan integritas tenaga medis. Sangat penting untuk menjaga citra puskesmas di mata masyarakat.<sup>3</sup>

Penerapan regulasi hukum tidak terlepas dari tantangan. Salah satu dampak negatif yang mungkin muncul adalah beban administratif yang meningkat. Dengan adanya banyak regulasi yang harus dipatuhi, tenaga medis di Puskesmas Pagar Jati sering kali merasa terbebani dengan tugas administratif.

## B. Kendala Yang dihadapi Dalam Implementasi Hukum Kesehatan di puskesmas pagar jati

### 1. Masalah yang terjadi di puskesmas pagar jati

Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang lebih selektif dan berpengetahuan dalam memilih layanan kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pemberi layanan kesehatan harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk mencapai hal ini, penting bagi Puskesmas untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang telah diberikan memenuhi harapan pasien. Dengan menjaga kepercayaan dan kepuasan pasien, Puskesmas dapat meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan, sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien secara lebih efektif.

Puskesmas Pagarjati, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan layanan yang optimal. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang seringkali mengakibatkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama, sehingga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai juga menjadi perhatian, di mana alat kesehatan yang tidak lengkap atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat proses diagnosis dan pengobatan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan di Puskesmas juga menjadi faktor krusial. Masih terdapat stigma negatif terhadap layanan yang disediakan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi atau pengalaman buruk sebelumnya. Ketidapahaman masyarakat mengenai prosedur birokrasi Puskesmas menyebabkan mereka enggan memanfaatkan layanan, lebih memilih untuk mencari perawatan di tempat yang lebih jauh meskipun dengan risiko yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Puskesmas untuk melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, Puskesmas dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka, sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih relevan dan efektif. Selain itu, komunikasi yang

<sup>3</sup> Suryati, S., Judijanto, L., Apriyanto, A., Zulkarnaini, Z., Suyami, S., Ifadah, E., ... & Sulistiany, E. (2024). *Etika Keperawatan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

jelas antara tenaga medis dan pasien perlu ditingkatkan untuk mengurangi miskomunikasi yang dapat merugikan kedua belah pihak, serta untuk memastikan bahwa pasien mengikuti prosedur pengobatan yang dianjurkan demi kesehatan mereka.

## 2. Faktor yang mempengaruhi implementasi hukum kesehatan di puskesmas pagar jati

Implementasi hukum kesehatan di Puskesmas Pagar Jati menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Kendala ini dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi tenaga medis, serta fasilitas yang tidak memadai. Keterbatasan ini membuat sulit bagi Puskesmas untuk menerapkan regulasi hukum kesehatan secara optimal, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan bagi pasien.

Selain itu, tantangan birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan. Proses administrasi yang berbelit-belit mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Motivasi tenaga medis juga menjadi faktor penting; jika mereka merasa kurang dihargai, kinerja mereka dalam menerapkan hukum kesehatan dapat terpengaruh.

Dari sisi eksternal, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan kesehatan menjadi masalah. Banyak pasien yang tidak memahami hak-hak mereka, yang menghambat partisipasi aktif dalam proses pelayanan. Selain itu, ada resistensi dari masyarakat yang lebih memilih pengobatan alternatif, sehingga kepercayaan terhadap layanan Puskesmas perlu dibangun kembali.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan penerapan hukum kesehatan di Puskesmas. Tanpa perhatian dan dukungan yang memadai, Puskesmas akan kesulitan memenuhi standar pelayanan. Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang sering terjadi juga dapat membingungkan tenaga medis, sehingga penting untuk terus memperbarui informasi dan pelatihan.

Jadi, komunikasi yang efektif antara manajemen Puskesmas dan tenaga medis sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang regulasi dan kebijakan baru. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pagar Jati dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisa Analisis Hukum Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Kepastian dan Keadilan penulis menyimpulkan bahwa Penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Puskesmas ini secara konsisten mematuhi regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah, yang tercermin dalam proses kerja yang terstruktur. Setiap langkah pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien hingga penanganan keluhan, mengikuti prosedur yang telah ditentukan, memastikan pasien mendapatkan layanan yang berkualitas dan tepat waktu.

Kebijakan yang diterapkan juga berkontribusi pada keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Namun, meskipun penerapan regulasi ini dirasa efektif, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan tantangan koordinasi antarinstansi dapat mempengaruhi implementasi regulasi secara optimal.

Kendala dalam implementasi hukum kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kurangnya tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang memadai menjadi masalah utama. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dalam pelayanan kesehatan juga berperan signifikan.

Semua faktor ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan hukum secara efektif, sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Pagar Jati tidak dapat berjalan dengan optimal. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum, perlu dilakukan upaya perbaikan pada berbagai aspek yang menjadi kendala, baik dari segi sumber daya maupun edukasi masyarakat.

## REFERENSI

Bdn. Rutinah, SST, Wawancara, Senin 10 Maret 2025

Berdame, N. R. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5).

Betan, A., Sofiantin, N., Sanaky, M. J., Primadewi, B. K., Arda, D., Kamaruddin, M. I., & AM, A. M. A. (2023). Kebijakan Kesehatan Nasional. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Diakses di <https://www.scribd.com/document/498639565/PROFIL-PUSKESMAS-PAGAR-JATI> Pada Sabtu 26 april 2025, Jam 12.33.

Hasanah, T. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Puskesmas Bandar Jaya Lahat. *MOTIVASI*, 5(2), 871-884.

Hasan, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)." Ticoalu, Sartika Sasmi. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat." *Lex et Societatis* 1.5 (2013).

Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F., & Rosadi, D. (2015). Program jaminan kesehatan nasional dari aspek sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesehatan. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1),

PUSKESMAS KEBON HANDIL KOTA JAMBI TAHUN 2020, *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ) 2020*

Suhartini, Endeh. "Hukum kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di Indonesia." (2019).

Titin Aprianti, S, Kep.Ns Dan Endang Setiowati, AMd.Keb, Wawancara, 10 Maret 2025